



UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

**TRANSFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI
PENGADILAN MARITIM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN
MARITIM**

**DHIMAS RUDY HARTANTO
NIM. 120200302007**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
2021**



UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

**TRANSFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI
PENGADILAN MARITIM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN
MARITIM**

**DHIMAS RUDY HARTANTO
NIM. 120200302007**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Dhimas Rudy Hartanto
NIM : 120200302007
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Fakultas Keamanan Nasional
Judul Tesis : Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia Guna Mewujudkan Keamanan Maritim

Pembimbing I,



Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S.,
M.Si.
Laksamana Pertama TNI
Tanggal: 02 Februari 2022

Pembimbing II,



Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI (Purn)
Tanggal: 03 Februari 2022






Mengetahui,

Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M., C.Fr.A
Marsekal Muda TNI
Tanggal: 10 Februari 2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Dhimas Rudy Hartanto NIM : 120200302007 Program Studi : Keamanan Maritim Fakultas : Fakultas Keamanan Nasional Judul Tesis : Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia Guna Mewujudkan Keamanan Maritim			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si. Laksamana Pertama TNI		02-02-2022
2.	Pembimbing II: Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H. Laksamana Muda TNI (Purn)		03-02-2022
3.	Reviewer I: Dr. Moch Yurianto, M.M. Laksamana Madya TNI (Purn)		03-02-2022
4.	Reviewer II: Dr. Achmed Sukendro, S.H., M.Si. Kolonel Ckm		03-02-2022
5.	Reviewer III: Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si. Pangkat/Korps/NRP/NIP		02-02-2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan saya sebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis/disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 27 Desember 2021



Dhimas Rudy Hartanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: “Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD. selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Marsekal Muda TNI Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M., C.Fr.A. selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional.
3. Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I.
4. Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh dosen Universitas Pertahanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan magister di Universitas Pertahanan.
6. Kedua orangtua peneliti yang selalu menjadi pendukung utama dan terdepan peneliti serta keluarga peneliti.
7. Guru dan Dosen di sekolah maupun di kampus S1 peneliti yang senantiasa mendoakan.
8. Mentor-mentor dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Pertahanan Cohort 12 terkhusus Program Studi Keamanan Maritim Cohort 8.
9. Narasumber penelitian yang membantu peneliti mendapatkan data penelitian.

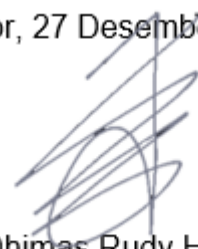
10. Teman-teman peneliti yang membantu peneliti selama proses penelitian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim guna mewujudkan keamanan maritim.

Bogor, 27 Desember 2021



Dhimas Rudy Hartanto

ABSTRAK

TRANSFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI PENGADILAN MARITIM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

DHIMAS RUDY HARTANTO

Mahkamah Pelayaran berdiri sejak zaman Belanda dengan kewenangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Eksistensi Mahkamah Pelayaran belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Lembaga yang seharusnya memiliki kapabilitas penyelesaian sengketa dan perkara yang timbul dilaut masih belum dimiliki Indonesia. Potensi ancaman yang tinggi karena Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia dan *Choke Point* yang menjadi jalur pelayaran internasional. Permasalahan penelitian yaitu latar belakang dan urgensi transformasi Mahkamah pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia serta upaya pemerintah dalam mewujudkan wacana transformasi Mahkamah Pelayaran menuju pembentukan Pengadilan Maritim. Tujuan penelitian menganalisis kedua permasalahan penelitian tersebut. Termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa performa Mahkamah Pelayaran belum efektif. Proses operasional Mahkamah Pelayaran mirip dengan lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Pelayaran memiliki nilai pembuktian di Pengadilan Negeri. Kesenjangan Mahkamah Pelayaran dan dengan adanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Perikanan juga belum dapat menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia maka dibutuhkan lembaga yang memiliki kapabilitas menyelesaikan masalah yang berpotensi timbul dari aktivitas kemaritiman. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah berupa studi banding dan *Focus Group Discussion*. Mahkamah Pelayaran berpotensi ditransformasikan menjadi Pengadilan Maritim dengan mengatasi kesenjangan antara Mahkamah Pelayaran dengan Pengadilan Maritim. Untuk meningkatkan kewenangan Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim dapat dilakukan dengan transformasi yang didahulukan dengan menumbuhkan *political will*, perubahan regulasi, dan pembentukan penanggung jawab transformasi. Transformasi dapat dilakukan dengan empat cara yaitu *re-framing*, *re-structuring*, *re-vitalization*, dan *re-newal*.

Kata Kunci: Keamanan Maritim, Mahkamah Pelayaran, Pengadilan Maritim, Transformasi

ABSTRACT

TRANSFORMATION OF THE SHIPPING COURT INTO A MARITIME COURT TO ACHIEVE MARITIME SECURITY

DHIMAS RUDY HARTANTO

The Shipping Court was founded in Dutch colonialism with the authority to further examine ship accidents. The existence of the Shipping Court had not been able to answer the problems faced. The institution that should have the capability in resolving disputes and cases that arise at sea is still not owned in Indonesia. The potential threat is high because Indonesia had the Indonesian Archipelago Sea Lane and Choke Point which is an international shipping lane. The research problem is the background and urgency of the transformation of the Travel Court into a Maritime Court in Indonesia and the government's efforts in realizing the discourse of the transformation of the Maritime Court towards the establishment of a Maritime Court. The research objective is to analyze the two research problems. Including qualitative research with literature study methods, observation, interviews, and documentation. The research results show that the performance of the Shipping Court had not been effective. The shipping court operational process is similar to that of a judicial institution. The decision of the Shipping Court had evidentiary value in the General Court. The gap between the Shipping Court and the existence of the District Court and the Fisheries Court had also not been able to answer the existing problems. Therefore, to support Indonesia as the global maritime nexus, an institution that can solve problems that could potentially arise from maritime activities is needed. Efforts had been made by the Government are in the form of comparative studies and Focus Group Discussions. The Shipping Court has the potency to be transformed into a Maritime Court by addressing the gap between the Shipping Court and the Maritime Court. Increasing the authority of the Shipping Court to become a Maritime Court, can be done with a transformation that takes precedence by growing political will, changing regulations, and establishing a person in charge of the transformation. Transformation can be done in four ways, namely re-framing, re-structuring, re-vitalization, and re-newal.

Keywords: Maritime Security, Maritime Court, Shipping Court, Transformation

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus dan Subfokus	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.2.1 Konsep Penegakan Hukum Bidang Maritim.....	14
2.2.2 Teori Transformasi	17
2.2.3 SWOT	21
2.2.4 Konsep Lembaga Peradilan	22
2.2.5 Konsep Pengadilan Maritim	26
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran	43

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Metode dan Desain Penelitian.....	44
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.2.1 Tempat Penelitian.....	45
3.2.2 Waktu Penelitian.....	45
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	45
3.3.1 Subjek Penelitian.....	45
3.3.2 Objek Penelitian	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.4.4 Studi Pustaka	48
3.4.4 Observasi	48
3.4.4 Wawancara	48
3.4.4 Dokumentasi	48
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
4.1.1 Latar Belakang dan Urgensi Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia	50
4.1.2 Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Wacana Transformasi Mahkamah Pelayaran Menuju Pembentukan Pengadilan Maritim	52
4.2 Hasil Pengumpulan Data	52
4.2.1 Latar Belakang dan Urgensi Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia	53
4.2.2 Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Wacana Transformasi Mahkamah Pelayaran Menuju Pembentukan Pengadilan Maritim	77
4.3 Hasil Pengolahan Data	81

4.3.1	Latar Belakang dan Urgensi Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia	82
4.3.2	Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Wacana Transformasi Mahkamah Pelayaran Menuju Pembentukan Pengadilan Maritim	85
4.4	Hasil Analisis Data	86
4.4.1	Latar Belakang dan Urgensi Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia	86
4.4.2	Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Wacana Transformasi Mahkamah Pelayaran Menuju Pembentukan Pengadilan Maritim	89
4.5	Interpretasi Data	92
4.5.1	Latar Belakang dan Urgensi Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia	92
4.5.2	Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Wacana Transformasi Mahkamah Pelayaran Menuju Pembentukan Pengadilan Maritim	93
4.6	Pembahasan	93
4.6.1	Latar Belakang dan Urgensi Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia	94
4.6.2	Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Wacana Transformasi Mahkamah Pelayaran Menuju Pembentukan Pengadilan Maritim	99
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1	Kesimpulan	106
5.2	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Penegakan Hukum	17
Gambar 2.2 Matriks SWOT	21
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Mahkamah Pelayaran.....	56
Gambar 4.2 Ruang Sidang Mahkamah pelayaran	60
Gambar 4.3 Ruang Sidang Mahkamah Pelayaran	61
Gambar 4.4 Bagan Transformasi Mahkamah Pelayaran menuju pembentukan Pengadilan Maritim.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Gap</i> antara Mahkamah Pelayaran dengan Pengadilan Maritim .8	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....38	
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....45	
Tabel 4.1 Perbandingan Penanganan Penegakan Hukum di Laut.....70	
Tabel 4.3 Triangulasi Data 182	
Tabel 4.4 Triangulasi Data 285	
Tabel 4.5 SWOT.....86	
Tabel 4.6 <i>Scenario Planning</i>104	